

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian implementasi kerjasama dalam pengelolaan TPA Regional Payakumbuh yang telah peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kerjasama oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga dapat diketahui apakah proses pelaksanaan kerjasama berhasil atau tidak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan, serta dokumentasi peneliti terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan TPA Regional Payakumbuh, serta dianalisis menggunakan Teori Ripley dan Franklin maka dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kerjasama dalam pengelolaan TPA Regional Payakumbuh belum berjalan dengan baik. Meskipun dari segi kepatuhan implementor dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sudah baik, akan tetapi hal tersebut belum mampu mengarah kepada pencapaian tujuan. Karena dari hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan tersebut baru mengarahkan pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan pelayanan persampahan regional di TPA Regional Payakumbuh bukan pada pelaksanaan kerjasama dalam pengelolaan TPA Regional Payakumbuh. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa isi kebijakan tentang kerjasama ini belum jelas sehingga bagi implementor dalam memahami kebijakan terjadi kesalahan dalam memahami tujuan kebijakan itu sendiri.

Meskipun secara isi kebijakan, kerjasama tentang Pengelolaan TPA Regional ini belum jelas, akan tetapi secara teknis masih banyak hal-hal yang seharusnya dapat membuat kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Seperti misalnya dari jumlah implementor dengan tupoksi yang sesuai, adanya kebijakan lain yang ikut diimplementasikan sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mudah di TPA, partisipasi publik yang sudah baik, serta faktor-faktor tak terkendali yang sangat kecil pengaruhnya untuk menghambat pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi karena substansi kebijakan yang belum jelas sehingga semua sumberdaya yang tersedia dengan baik belum mampu bekerja sesuai dengan apa yang di maksud dalam tujuan kebijakan itu sendiri. Sehingga baik dan patuhnya implementor dalam melaksanakan ketentuan kebijakan belum mampu mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/kota terkait untuk dapat menyempurnakan pelaksanaan kerjasama TPA Regional Payakumbuh. saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang terdapat dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama khususnya dalam hal pengelolaan TPA Regional Payakumbuh.
2. Meningkatkan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menekan pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan arah pencapaian tujuan.
3. Menyediakan anggaran yang cukup dan memadai untuk kegiatan pemrosesan sampah baik di kabupaten/kota maupun di TPA Regional. Sehingga kegiatan

pengadaan teknologi di TPA Regional dapat dilakukan, supaya adanya TPA Regional dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

4. Meningkatkan partisipasi pemerintah khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah baik di TPA maupun di kabupaten/kota.
5. Meningkatkan upaya pengelolaan dampak disekitar lokasi TPA akibat kegiatan pengelolaan sampah di TPA.

